

JURNAL KAJIAN MEDIA

e-ISSN: 2579-9436, URL: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ilkom/index>

Vol. 2 No. 1	Juni 2018	Halaman 53 - 66
--------------	-----------	-----------------

Peran KPID Jawa Barat dalam Pelaksanaan Sosialisasi Literasi Media Menggunakan Media Sosial

Lucy PujasariSupratman
Universitas Telkom, Indonesia
doktorlucysupratman@gmail.com

English Title: *The Role of KPID Jawa Barat in Promoting Media Literacy through Social Media*

Abstrak - Jawa Barat menempatkan diri sebagai provinsi dengan jumlah televisi lokal terbanyak. Keberadaan lembaga penyiaran perlu disampaikan kepada publik oleh KPID Jawa Barat untuk memenuhi hak publik agar mengetahui eksistensi lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Sosialisasi literasi media menggunakan media sosial Twitter pada masyarakat Jawa Barat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi guna menguatkan keberadaan lembaga penyiaran di Jawa Barat bagi kemaslahatan bersama. Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus. Penulis telah melakukan observasi langsung dan pencatatan secara sistematis mengenai sosialisasi literasi media, proses observasi di lapangan saat melakukan sosialisasi, program-program yang dilakukan untuk mendorong gerakan literasi media selama penelitian dilakukan yang keseluruhan program kegiatannya dibagikan pada masyarakat di media sosial Twitter KPID Jawa Barat. Fungsi penggunaan Twitter ini adalah untuk saling bahu membahu mewujudkan program literasi media dengan menselaraskan komunikasi, transparansi, seluruh informasi kegiatan-kegiatan KPID Jawa Barat yang memiliki tujuan akhir mempererat hubungan masyarakat penonton TV/pendengar radio dengan KPID Jawa Barat.

Kata Kunci: KPID Jawa Barat, Literasi Media, Twitter

Abstract - West Java is the province with the largest number of local television. The existence of broadcasting institutions should be submitted to the public by KPID West Java to fulfill the public's right. The media literacy socialization using Twitter to West Java people is done to strengthen the existence of broadcasting institutions. The author uses a case study research method. The author has made a direct observation and recording systematically on the socialization of media literacy, the process of field observation during socialization, the programs undertaken to encourage media literacy movement during the research conducted the whole program which distributed to the community in KPID West Java Twitter. The function of Twitter's is to realize the media literacy program by aligning communication, transparency, KPID West Java activities information that have the ultimate goal to strengthen the public relations of viewers / listeners with KPID West Java.

Keywords: KPID West Java, Media Literacy, Twitter

PENGANTAR

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Selain memiliki kebebasan, lembaga penyiaran harus bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Perkembangan dan pertumbuhan media penyiaran di Jawa Barat terus mengalami peningkatan signifikan karena secara ekonomi, politik, sosial dan budaya, Jawa Barat merupakan wilayah yang sangat strategis dan potensial.

Beragam aduan dan pelanggaran tersebut berjumlah sangat banyak dalam ranah TV nasional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran komisi penyiaran dalam mengawasi isi siaran di media massa. Hal serupa juga terjadi di TV dan Radio lokal di daerah – daerah yang diawasi oleh KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) di Indonesia. Setiap provinsi memiliki 1(satu) lembaga independen komisi penyiaran daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Di tingkat KPID, KPID yang paling tegas memberikan sanksi pada lembaga penyiaran adalah KPID Jawa Barat berdasarkan hasil wawancara riset bersama Ketua KPID Jawa Barat (Dr. Dedeh Fardiah, M.Si) di kantor KPID Jawa Barat. Ketua KPI Jawa Barat telah mengeluarkan teguran sebanyak 384 buah pada lembaga penyiaran yang dianggap menyalahi aturan konten penyiaran yang ada dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Fungsi KPID Jawa barat kemudian untuk mengawasi tiap isi siaran dan memiliki wewenang untuk menegur lembaga penyiaran media.

KPID Jawa Barat adalah perwakilan dari KPI pusat untuk mengurus hal yang berkaitan dengan penyiaran. Perannya harus mampu dan aktif melakukan pengawasan berkala pada lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran di Jawa Barat yang sudah terdaftar berjumlah 232 LPS Radio, 152 LPK Radio, 7 LPPL Radio, 8 LPP Radio, 5 LPK Televisi, 1 LPPL Televisi, 7 LPP Televisi, 13 LPB Televisi, 44 LPS Televisi Analog dan 46 LPS Televisi Digital.

JUMLAH LEMBAGA PENYIARAN DI PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI JAWA BARAT								
	Radio Swasta	Radio Publik	Radio Komunitas	TV Swasta	TV Digital	TV Berlangganan	TV Publik	TV Komunitas
Kota Bandung	48		3		20	7	1	
Kab. Bandung	2		28					
Kota Cimahi	2							1
Kota Bekasi	2		4		1			
Kab.Bogor	5							
Kota Bogor	4		7			1		
Kota Depok	2		4		1			2
Kab.Ciamis	11		3					
Kota Banjar	5							
Kab. Cianjur	12	1	5	1	3			
Kab. Cirebon	10	1	6		2			
Kota Cirebon	11		1		2	1		
Kab.Garut	15		12		1			
Kab.Indramayu	12	1	10					1
Kab.Karawang	7		7		2	1		
Kab.Kuningan	7	1	3	4			1	
Kab.Majalengka	6	1	9	5	1			

Kab. Purwakarta	10		3	2	2	1		
Kab.Subang	12		10		1			
Kab.Sukabumi	15		1		2			
Kota Sukabumi	8		1	2	1			
Pelabuhan Ratu				1				
Kab.Sumedang	6	1	12	3	2			
Kab.Tasikmalaya	9	1	6		2			
Kota Tasikmalaya	8		1		2	1		
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur				19				
Cirebon, Indramayu				2				
Garut, Tasikmalaya, Ciamis				1				
Jabodetabek				2				

Sumber: Data Buku Direktor KPID Jawa Barat 2015

KPID Jawa Barat melihat bahwa masyarakat Jawa Barat harus mendapatkan program tayangan yang bermanfaat sesuai amanat undang-undang No 32 Tahun 2002. KPID Jawa Barat banyak melakukan program-program terkait literasi media tersebut untuk mewujudkan lembaga penyiaran lokal yang sehat. Selain itu, KPID Jawa Barat juga berupaya untuk membangun kepedulian masyarakat pada televisi lokal. Program tayangan televisi lokal memang lebih kental pada program tayangan daerah dengan penuh nuansa budaya. Hal ini sangat perlu disosialisasikan sebagai bentuk informasi dan edukasi pada masyarakat tentang jati diri/identitas *local wisdom*. Seperti kita ketahui, program tayang di TV nasional mayoritas berkilat *jakartanism*. Maka, lahirnya TV lokal yang mengemban program tayangan dengan visi misi mempreservasi budaya lokal sebaiknya menjadi pilihan tontonan utama warga Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat dibagi dalam 83 wilayah layanan dengan mempertimbangkan kondisi geografi serta potensi ekonomi untuk berkembangnya peluang usaha. Untuk televisi analog baik untuk stasiun lokal maupun berjaringan diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF). Frekuensi yang digunakan oleh televisi pada kisaran 478 sampai 806 MHz UHF. Jawa Barat menempatkan diri sebagai provinsi dengan jumlah televisi lokal terbanyak. Dalam meningkatkan akses terhadap lembaga penyiaran di Jawa Barat perlu adanya data dan informasi yang memberikan gambaran mengenai keberadaan lembaga penyiaran yang memang terus mengalami peningkatan. Keberadaan lembaga penyiaran pun perlu disampaikan kepada publik, selain sebagai bentuk pertanggung jawaban salah satu fungsi KPID Jawa Barat dalam Bidang Infrastruktur kepada publik, juga untuk memenuhi hak publik untuk tahu akan eksistensi lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Dengan adanya data eksistensi lembaga penyiaran di Jawa Barat diharapkan berbagai pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, khususnya masyarakat Jawa Barat data ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam menguatkan keberadaan lembaga penyiaran di Jawa Barat sekaligus memanfaatkan potensi besar ini bagi kemaslahatan bersama.

Gambar 1

STRUKTUR KEANGGOTAAN KPID JAWA BARAT



(Dr.Dedeh Fardiah, M.Si, Dadan Saputra, S.Pd., M.Si, Neneng Athiatul, S.Ag., M.Ikom,
Dr. Mahi Hikmat, M.Si, Dr. Aep Wahyudin, M.Si, Ir Irianto Edi Pramono,
Mochamad Syarifurohman)

Penelitian ini dipusatkan pada peran KPID Jawa Barat sebagai lembaga independen Negara berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2002 dan P3SPS. Beragam program-program literasi media yang telah dijalankan oleh KPID Jawa Barat untuk mensosialisasikan literasi media, namun masih belum dirasakan secara penuh oleh masyarakat Jawa Barat.

“Literasi media adalah program unggulan dari kelembagaan..program literasi media menggunakan sosial media itu terkait dengan teknologi yang terkait dengan kita, kalau teknologi yang terkait dengan sosialisasi, kita punya website dan akun Twitter serta beberapa sosial media dimana tersedia fitur – fitur tentang kegiatan ,infrastruktur, *profile* sudah ada dan kami terus melakukan *update* sesuai dengan SDM yang kami punya. Kemudian ada juga yang terkait dengan pemanduan masyarakat melalui teknologi yang kita punya” (Wawancara bersama Ketua KPID Jawa Barat Dr.Dedeh Fardiah)

Masih cukup banyak masyarakat Jawa Barat yang tidak memberikan perhatiannya pada konten TV lokal dan mendukung TV lokal sebagai tontonan utama bila ingin mengetahui banyak hal tentang Jawa Barat. Maka dari itu, program literasi media harus dimodifikasi pada program – program literasi media yang telah dijalankan. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat dalam pelaksanaan sosialisasi literasi media menggunakan media sosial Twitter. Twitter sebagai media socialunik yang memiliki keterbatasan karakter menjadi pilihan bagi KPID Jawa Barat untuk menyebarkan pesan literasi dengan cara yang singkat, lugas dan jelas. Media sosial Twitter dapat memudahkan KPID Jawa Barat membagikan informasi tentang literasi

serta agenda kegiatan – kegiatan program literasi media para komisioner KPID Jawa Barat dengan penggunaan *hashtags* (#) agar dapat menjadi *trending topic* dan (@) *mention* agar terhubung pada *hashtags* pengguna Twitter lainnya untuk kembali disebarkan lagi dengan “*retweet*” oleh *follower* akun Twitter KPID Jawa Barat. Media sosial twitter masih belum terkalahkan oleh *media social* lainnya dalam hal intensitas kecepatan penyebaran berita yang terjamin reliabilitas kepercayaannya.

Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus pada penelitian ini. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland (dalam Moleong, 1995:112) adalah kata – katadan tindakan yang dianggap sebagai informasi yang akurat untuk dijadikan data diperoleh dari sumber data (informan). Lincoln dan Guba (1985, 359:360) mengemukakan keistimewaan – keistimewaanyang dimiliki oleh metode penelitian studi kasus:

1. Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian epik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti.
2. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari – hari.
3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
4. Studi kasus memungkinkan penulis dapat menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual, tetapi juga menggambarkan keterpercayaan.
5. Studi kasus memberikan ‘*thick description*’ yang diperlukan untuk keperluan penilaian atas transferabilitas.

Studi kasus terbuka untuk keperluan penilaian pada konteks. Penilaian ini turut berperan dalam pemaknaan fenomena yang terdapat dalam konteks tersebut. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian maka peneliti dapat memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Ketua KPID Jawa Barat dan para komisioner dijadikan informan kunci (*key informan*) dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) secara purposif, artinya pemilihan informan berdasarkan pertimbangan rasional penulis bahwa informan tersebutlah yang benar – benar memiliki kompetensi untuk memberikan informasi atau data yang diharapkan penulis (Suprayogo dan Tobroni, 2001, 133:134). Selanjutnya selain kata – katadan tindakan sebagai sumber data utama juga ada sumber lain yaitu sumber data tertulis seperti buku-buku, dokumen, surat kabar, foto dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan informan untuk menjalin hubungan yang intensif dan dekat dengan melakukan wawancara secara mendalam. Pada awalnya peneliti melakukan strategi yang menurut Alwasilah (2002:144) dalam penelitian kualitatif dikenal dengan *gaining entry* atau *establishing rapport* diidentikan dengan, “kulo nuwun terhadap lokasi penelitian dan silaturahmi kepada responden”. Fungsi semuanya ini adalah negosiasi terhadap subjek yang diteliti. Karena itu kehadiran penulis untuk membuka maksud dan tujuan penelitian, berkenalan atau memperkenalkan diri, menjalin hubungan untuk membuat agenda pertemuan agar menjadikan hubungan antara subjek dan objek penelitian menjadi cair.

Penulis telah melakukan pengamatan langsung atau observasi partisipan dengan berperilaku dan berperan sebagai teman mereka untuk mendapatkan catatan–

catatan atau data penelitian di lapangan. Observasi partisipan dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai sosialisasi literasi media, proses observasi di lapangan saat melakukan sosialisasi, program-program yang dilakukan untuk mendorong gerakan literasi media selama penelitian dilakukan. Penelusuran dan perolehan informasi dengan cara menggunakan data – data sebagai bukti atau fakta otentik yang diperlukan dan mendukung penelitian. Seperti dokumentasi berupa foto-foto berbagai program kegiatan KPID Jawa Barat yang diperoleh baik dari subjek penelitian yang meliputi langsung sebuah kegiatan, peristiwa tertentu.

DISKUSI

Lahirnya KPID Jawa Barat merupakan kebutuhan dari UU penyiaran no 32 tahun 2002. Sama halnya dengan KPI pusat, bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Maka sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, di mana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU ini adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Undang-undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3 yang menegaskan: “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.

Sejak tahun 2008 KPID dibantu sekretariat di mana status sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia daerah Jawa Barat resmi menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan 4 (empat) orang Kasubag yaitu Kasubag TU, Kasubag Pembinaan dan Pengawasan, Kasubag Komunikasi dan Kasubag Standarisasi. Dengan kekuatan personil PNS sebanyak 15 (lima belas) orang yang bertindak sebagai fasilitator pelaksanaan program kerja komisioner KPID Jawa Barat yang dibiayai penuh dari APBD Jawa Barat. Dalam mensosialisasikan mengenai literasi media KPID Jawa Barat selalu menegaskan beberapa format yang harus diperhatikan seperti siaran jurnalistik (berita, *talkshow*), sinetron, film, acara musik, infotainment dan iklan. Anggaran didukung dari APBD, namun secara keseluruhan jumlah anggaran memang masih belum memadai karena jumlah lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat cukup banyak yakni 531 dan penduduk di Jawa Barat kurang lebih 50 juta penduduk yang tersebar ke 27 kota kabupaten. Sedangkan diseminasi setiap tahunnya hanya diberi 3 (tiga) anggaran atau wilayah saja setiap

program kegiatan, konsekuensinya semua wilayah belum dapat tersentuh secara merata karena keterbatasan anggaran. Dengan anggaran yang ada target tahunan kegiatan sosialisasi media literasi selalu tercapai bahkan dampak dari sosialisasi akhirnya pihak KPID Jawa Barat sering di undang sebagai narasumber untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang pernah diberikan sosialisasi.

“KPID dalam menjalani strategi tersebut secara soft dan hard harus disertai strategi, Kita selalu berfikir, kalau saya punya keyakinan dan teman teman saya pikir begitu, saya punya kekuatan kalau saya tidak sendiri, menurut saya begitu. Ada teman teman saya (7 orang ini) yang memang mensupport, dan saya yakin bahwa masyarakat itu mensupport. Itu saja keyakinan - keyakinan bahwa kami banyak yang mensupport, karena ini bukan untuk main main , karena ini untuk mensupport dan menyangkut moral bangsa. Dan keyakinan itu yang membuat kami jalan terus. Nah memang Bu Dedeuh ini aktif dalam mengadakan Talkshow, ILM, dan juga di dalam media sosial, seperti Twitter”, (Wawancara bersama Ketua KPID Jawa Barat Dr.Dedeh Fardiah)

KPID Jawa Barat melakukan beberapa saluran komunikasi agar materi sosialisasi literasi media sampai kepada masyarakat dengan menggunakan saluran tatap muka dan saluran online. Flew (2008) menjelaskan keuntungan penyebaran informasi menggunakan media online:

1. *Manipulable*. Informasi digital mudah diubah dan diadaptasi dalam berbagai bentuk, penyimpanan, pengiriman dan penggunaan.
2. *Networkable*. Informasi digital dapat dibagi dan dipertukarkan secara terus – menerus oleh sejumlah besar pengguna di seluruh dunia.
3. *Dense*. Informasi digital berukuran besar dan dapat disimpan di ruang penyimpanan kecil atau penyedia layanan jaringan.
4. *Compressible*. Ukuranin formasi digital yang diperoleh dari jaringan manapun dapat diperkecil melalui proses kompres dan dapat didekompres kembali saat dibutuhkan.
5. *Impartial*. Informasi digital yang disebarkan melalui jaringan bentuknya sama dengan yang dipresentasikan dan digunakan oleh pemilik atau penciptanya.

Gencarnya KPID Jawa Barat melakukan sosialisasi melalui saluran online karena KPID Jawa Barat hanya memiliki jatah kota/kabupaten untuk satu program 4(empat) wilayah. Jadi dalam satu tahun hanya terdapat 12 wilayah saja yang dapat dijangkau oleh KPID Jawa Barat. Sementara untuk radio, KPID Jawa Barat memiliki anggaran dari pemerintah hanya cukup untuk 10(sepuluh) radio. Radio – radio tersebut memiliki hak kepada kami untuk melakukan perpanjangan izin, serta kewajiban menayangkan iklan layanan masyarakat. Apalagi ini menyangkut literasi ke pada masyarakat dan mereka sebarakan. Dan itu sangat membantu dalam strategi mennyiasati anggaran. Pada dasarnya mereka sebagai media, mau menyampaikan layanan terhadap masyarakat. Dan memang kendalanya saat ini masih di televisi nasional, karena itu berbenturan dengan iklan. Dan untuk televisi lokal pun kami tidak terkejar. Karena terkadang untuk *talkshow* pun dalam 7(tujuh) terbagi – bagi, dan tiap harinya *talkshow* tersebut sudah habis. Maka dari itu selain di radio, KPID Jawa Barat aktif dalam Twitter. Namun, Setiap tahun KPID Jawa Barat memiliki target yang berbeda – beda wilayahnya agar dapat terliput di seluruh wilayah kerjanya. Dalam observasi dan wawancara yang telah dilakukan, KPID Jawa Barat tidak pernah kehilangan akun untuk gencar

mensosialisasikan literasi media. Penggunaan media Twitter yang juga memasukkan link akun situs website resmi KPID Jawa Barat dapat dengan mudah diakses.

Gambar 2



Sumber: Media Sosial Twitter KPID Jawa Barat (2017)

Langkah – langkah yang dilakukan KPID Jawa Barat dalam melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dengan cara menyediakan sarana/media agar masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait isi siaran melalui formulir aduan yang dapat diakses melalui media internet dan media sosial, misalnya melalui Email, Website, Facebook, Twitter, juga melalui SMS (Supratman, 2017). Memang selama ini secara formal belum mengevaluasi atau juga dari pertemuan – pertemuan media literasi, dan baru pertemuan secara internal saja. Tapi secara informalnya KPID Jawa Barat menuliskan kepada publikasi ilmiah atau juga media massa. Sebenarnya sudah strategi penggunaan media sosial Twitter dirasakan lebih efektif dan mengena pada target masyarakat, dibandingkan harus menunggu anggaran yang berasal dari APBD. Anggaran APBD tersebut termasuk pada isi siaran dan kajian atau setiap kegiatan apapun, evaluasi dengan Rapat Pleno Komisioner setiap minggunya. Di dalam rapat komisioner, ada yang disebut dengan hari pasar (senin) karena pada hari itu komisioner lengkap. KPID Jawa Barat memiliki *timeline* dan rapat pleno setiap bulannya karena KPID Jawa Barat mendapat fasilitas dari sekretariat pemerintah.

Berikut adalah kegiatan – kegiatan literasi media KPID Jawa Barat yang dibagikan dalam media sosial Twitter.



Ketua dan Koordinator kelembagaan KPID Jawa Barat dalam melaksanakan pembinaan bertemakan "Pendidikan Dasar Jurnalistik dan Dasar Presenter Televisi" yang bekerjasama dengan KPID Jawa barat dan FKPPi Jawa Barat.



Kegiatan literasi media dengan mengajak warga Jawa Barat melaporkan aduan pemirsa terkait isi tayangan TV dan Radio.



Kegiatan Evaluasi dengan pendapat tentang permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan radio ADS Karawang.



Kegiatan berdiskusi, rapat pleno dan evaluasi ketua dan para komisioner KPID Jawa Barat.



Kunjungan Kerja KPID Jawa Barat ke Radio Republik Indonesia di Batam, Kepulauan Riau.



Kegiatan Rapat Pleno tentang Ekspose Laporan Pendahuluan Kajian Akademik Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan di Kantor KPID Jawa Barat.



Kegiatan Talkshow tentang Konten Ramadhan di Radio Reks, Garut.



Kegiatan Rapat Pleno Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) di Kementerian KOMINFO di Ibukota Jakarta.



Kegiatan Rapat Klarifikasi Radio Ardan



Kegiatan Penganugerahan KPID Award ke 10 Tahun 2017 yang diberikan oleh Inews dan diberi hastag @KPI Pusat, @diskominfojabar, @humasjabar, @humasDPRD, @Humasbdg dan @jabarprovgoid.



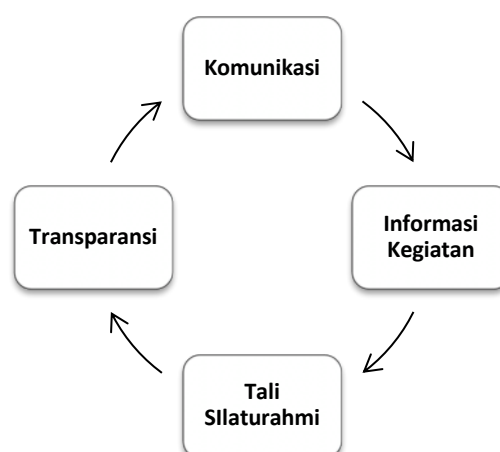
Video ucapan selamat atas terselenggaranya KPID Jawa Barat Award di Media Twitter oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.



Sambutan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat H.Deddy Mizwar, S.Sn., S.E., M.I.Pol, Ketua KPID Jawa Barat Dr.Dedeh Fardiah, M.Si, dan Ketua Panitia KPID Jawa Barat Award 2017 Dr.Aep Wahyudin dalam satu bingkai *caption*.

Hal besar yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat adalah aktifnya penggunaan media sosial untuk mendekatkan literasi media pada masyarakat secara luas. Masyarakat dapat bebas melakukan pemantauan program tanyangan sampai ke pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung dengan *men-tweet* Twitter KPID Jawa Barat. Kemudahan akses internet ini merupakan cara KPID mendekatkan diri melalui program literasi media agar dapat terus mendorong penyiaran yang sehat dan pemirsa yang kritis. Kegiatan – kegiatan dalam media sosial Twitter tersebut juga merupakan sarana edukasi kepada masyarakat tentang kegiatan – kegiatan KPID Jawa Barat. Masyarakat dapat bertanya menggunakan tagar *mention*, mengomentari suatu tayangan yang tidak sesuai dengan P3SPS, serta membagikan kembali tautan tentang kegiatan literasi media di Twitter.

MODEL FUNGSI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TWITTER OLEH KPID JAWA BARAT



Sumber: Hasil Penelitian (2017)

Kekhasan penggunaan media sosial twitter oleh masyarakat informasi adalah efektifitas kemudahan dan kecepatan pada penyebaran berita dari sumber yang terpercaya. Comm

(2010) menguraikan jenis *tweet* yang biasanya banyak dipergunakan di halaman timeline twitter:

<i>Mundane</i>	Tweet yang paling banyak dihasilkan dan menjadi pondasi awal hubungan antar pengguna
<i>Communicator</i>	Tweet yang sifatnya perbincangan antara pengguna dengan menggunakan fitur reply atau retweet
<i>Inquisitor</i>	Tweet berisi pertanyaan dari pengguna twitter
<i>Answerman</i>	Tweet yang berisi jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh tweet yang muncul
<i>Sage</i>	Tweet yang berisi kutipan, kalimat motivasi, dan sebagainya
<i>Reporter</i>	Tweet sebagai alat reportasi yang berisi informasi-informasi aktual yang disebarkan sebelum menjadi berita di media mainstream
<i>Kudos</i>	Tweet berisi ucapan terimakasih yang ditujukan pada pengguna twitter lainnya
<i>Critic</i>	Tweet berisi kritik, ketidakpuasan, dan keluhan yang disampaikan pada lembaga, pemerintah hingga personal
<i>Advocate</i>	Tweet yang berisi dukungan
<i>Benefactor Tweet</i>	Tweet yang dipergunakan untuk dapat kembali dibagikan (<i>retweet</i>) untuk suatu benefit.

Sumber: Comm (2010)

Dari kesepuluh fungsi jenis *tweet* tersebut, Twitter KPID Jawa Barat telah memodifikasi 6(enam) penggunaan sosial media tersebut dalam fungsi *Mundane*, *Communicator*, *Inquisitor*, *Answerman*, *Reporter*, dan *Kudos*. Twitter KPID Jawa Barat selalu gencar mengajak masyarakat untuk mengikuti (*follow*) twitter KPID Jawa Barat agar tercipta hubungan hangat antar pengguna twitter. Fungsi *Mundane* dan *Communicator* menjadi bentuk komunikasi paling awal agar masyarakat dapat aktif berpartisipasi menjadi bagaian dari duta program literasi media di dunia maya. Setelah terjadi konektivitas hubungan tersebut, masyarakat yang telah menjadi *follower* KPID Jawa Barat dapat bertanya, membantu menyebarkan, melayangkan keluhan/laporan tentang tayangan TV atau radio, serta mengucapkan pernghargaan dan ucapan terima kasih. 6(enam) fungsi dalam Twitter dalam menyebarkan program literasi media melalui media sosial tersebut telah terlaksanakan dengan baik pada KPID Jawa Periode 2015 – 2018ini.

KESIMPULAN

Ketua dan seluruh komisioner KPID Jawa Barat saling bahu membahu mewujudkan program literasi media dengan mennyelaraskan komunikasi, transparansi, seluruh informasi kegiatan – kegiatanKPID Jawa Barat yang tujuan akhirnya adalah menyambung tali silaturahmi yang erat masyarakat dengan KPID Jawa Barat. Bentuk koordinasi tersebut

diwujudkan dalam pertemuan resmi (RAPIMNAS) dimana ketua, wakil dan sekretariat berkumpul untuk membahas permasalahan – permasalahan. Selain itu, terdapat rapat RAKOORNAS dimana 7(tujuh) komisioner serta *secretariat berembug* mendiskusikan kegiatan. Namun, inti dari program literasi menggunakan media sosial Twitter adalah ajakan pada masyarakat agar dapat memfasilitasi informasi yang bersih di ranah publik dan menyuarakan penyiaran yang baik. Saat ini, banyak *follower* Twitter (masyarakat luas) yang mulai terbiasa melaporkan aduan tentang pelanggaran tayangan di lembaga penyiaran.

Pelanggaran yang umumnya disampaikan oleh masyarakat di media sosial Twitter tentang program tayangan pada lembaga penyiaran radio dan televisi bersifat fluktuasi. Ada list konten program yang melanggar, KPID Jawa Barat lebih ke rekapitulasi dalam website, media, publikasi *off-air* misalkan ada yang meminta seperti *pamflet*, *leaflet*. Dalam *leaflet* KPID disana ada rekapitulasi pelanggaran, setiap tahunnya. Di dalam *leaflet* tersebut ditampilkan jumlah pelanggaran. Tapi dengan sengaja untuk publik, seperti *press conference*, ada kekhawatiran itu tidak boleh, artinya ada sebuah penggiringan opini, kan media juga bukan untuk dimusuhi oleh masyarakat, namun kita juga kembali lagi bahwa itu adalah cara yang tidak baik dan berlebihan. Karena kita tidak perlu ada *press conference* seperti debat presiden seperti sekarang. Kita hanya melakukan lewat media kita yang standar. Tapi itu di publish di website, apabila *off-air* di *leaflet*, ataupun dengan cara langsung seperti ini. Walaupun data itu pun kita terbuka. Jadi sebenarnya kita juga ingin membentuk suatu peyiaran yang sehat, dan kami juga tidak bermaksud untuk *bully* media, tapi kita ingin memposisikan penyiaran yang sehat dan penonton yang cerdas, jadi kita semaksimal mungkin tidak terlalu radikal, dan mencoba untuk menempatkan aturan ke ranah kita. Bentuk pelanggaran seperti tidak ada klasifikasi acara (penggolongan kelompok umur); menampilkan kekerasan verbal (kata – kata kasar dan kata – kata yang menjurus ke seksualitas)&non verbal; melecehkan SARA, melecehkan kaum minoritas, misal: Banci, Janda dll; menampilkan adegan berbahaya dan memakan makanan yang tidak layak untuk dimakan; melakukan hal – hal yang berbahaya; memperlihatkan anggota tubuh yang tidak layak untuk dipertontonkan; menampilkan korban berdarah dan luka mengenaskan; terdapat adegan bunuh diri dan percobaan membunuh; memperlihatkan *test pack* dan membenarkan aborsi; adanya adegan mabuk – mabukan dan merokok; ketentuan iklan (iklan dewasa, iklan rokok); siaran pemilu (iklan, pemberitaan, *talkshow*, program), ketentuan jam tayang, iklan obat kuat dan paranormal serta lagu dengan lirik sensual. KPID Jawa Barat memandang bahwa program literasi media menggunakan media sosial sangat membantu mereka dalam penyebaran informasi secara *instan*. Hal ini sangat *urgent* dilakukan karena masyarakat masih memiliki sikap *omnificient* (melahap semua tayangan yang ditonton).

DAFTAR BACAAN

Aufderheide, P., ed. 1993. *Media Literacy. A report of the national leadership conference on media literacy*. Aspen, CO: Aspen Institute.

- Baran, Stanley J. dan Davis, Dennis K. 2009. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. 5th edition, USA: Wadsworth/ Thomson Learning.
- Brunner, Cornelia, and Tally, William. 1999. *The New Media Literacy Handbook*. New York: Anchor Books.
- Buckingham, D dan Domaille, K. 2002. *Where are we going and how we can get there?*. Institute of Education University of London: London.
- Buckingham, D. 2003. *Media Education, Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Cambridge: Polity Press.
- Craggs, Carol E. 1992. *Media Education in the Primary School*. London: Routledge.
- Comm, Joel. 2010. *Twitter Power 2.0: How to Dominate your Market One Tweet at a Time*. New Jersey: Wiley & Sons Inc.
- Hobbs, R. 1999. *The Acquisition of Media Literacy Skills among Australian Adolescent*. Journal of Broadcasting and Media [online]. Available from: www.interact.uoregon.edu/MediLit/mls/readingarticles/hobbs.australia.html.
- Flew, Terry. 2008. *New Media: An Introduction*. South Melbourne: Oxfor University Press.
- Kellner, D dan Share, J. (2005) *Toward Critical Media Literacy: Core Concepts, Debates, Organizations, and Policy*. England: Routledge Taylor & Francis Group.
- Masterman L. 2003. *Teaching Media*. Routledge Taylor & Francis Group: England
- Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2002 on Broadcasting. Ratified in Jakarta on December 28, 2002.
- Region-Indonesia Broadcasting Commision. 2015. *Directory of the Licensed Broadcasting in West Java Province 2015*. West Java, Bandung, Indonesia.
- Supratman, Lucy Pujasari. 2017. *Studi Kasus Strategi KPID Jawa Barat dalam Mensosialisasikan Literasi Media*. Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol 20, No 1
- Tyner, Kathleen. 2010. *Media Literacy: New Agendas in Communication*. New York: Routledge.